

INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS SMART GOVERNANCE DI INDONESIA: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW STRATEGI, HAMBATAN, DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK

Fitrianti Herawati ^{1*}

¹ Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

*Corresponding Email: 044970457@ecampus.ut.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan transformasi digital dalam pelayanan publik melalui penerapan smart governance di Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan kepercayaan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi masyarakat, serta keterbatasan integrasi antarinstansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi implementasi, hambatan, serta dampak inovasi pelayanan publik berbasis smart governance terhadap kepercayaan publik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menelaah berbagai artikel ilmiah yang relevan dari database akademik, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan sintesis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi utama dalam implementasi smart governance meliputi digitalisasi layanan, penguatan sistem data terintegrasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, hambatan utama yang ditemukan adalah kesenjangan digital, keterbatasan kompetensi aparatur, dan resistensi budaya organisasi. Pembahasan menunjukkan bahwa meskipun smart governance mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan SDM. Kesimpulannya, inovasi pelayanan publik berbasis smart governance berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan dan kepercayaan publik, namun masih memerlukan penguatan strategi implementasi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Kata kunci: smart governance, pelayanan publik, inovasi, kepercayaan publik, SLR

Abstract: This study is motivated by the increasing need for digital transformation in public services through the implementation of smart governance in Indonesia, aiming to improve service quality, transparency, and public trust. However, its implementation still faces several challenges such as digital infrastructure gaps, low digital literacy, and limited inter-agency integration. The purpose of this study is to analyze implementation strategies, barriers, and the impact of smart governance-based public service innovation on public trust in Indonesia. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) by reviewing relevant academic articles from scientific databases and analyzing them qualitatively using thematic synthesis. The findings indicate that the main strategies in smart governance implementation include service digitalization, strengthening integrated data systems, and improving human resource capacity. However, key barriers include the digital divide, limited bureaucratic competence, and organizational cultural resistance. The discussion shows that although smart governance improves efficiency, transparency, and effectiveness of public services, its success highly depends on infrastructure readiness and human resource capacity. In conclusion, smart governance-based public service innovation contributes positively to service quality and public trust, yet still requires more equitable and sustainable implementation strategies across Indonesia.

Keywords: smart governance, public service, innovation, public trust, SLR

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Katharina, 2021). Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut melalui transformasi digital dalam sistem birokrasi. Salah satu konsep yang muncul sebagai jawaban atas tantangan tersebut adalah smart governance, yaitu pendekatan tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelayanan publik. Smart governance tidak hanya dipahami sebagai penggunaan teknologi, tetapi juga sebagai perubahan menyeluruh dalam sistem administrasi dan budaya kerja pemerintahan (Zein et al, 2025).

Di Indonesia, implementasi smart governance menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital nasional. Pemerintah telah mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai upaya untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis digital di berbagai sektor (Ramadhany et al, 2025). Berbagai inovasi telah dikembangkan, seperti aplikasi layanan pengaduan masyarakat, sistem administrasi kependudukan digital, layanan pendidikan berbasis teknologi, hingga sistem pelayanan terpadu di tingkat daerah. Inovasi-inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Ridha et al, 2025).

Namun demikian, implementasi smart governance di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Loso et al, 2023). Daerah dengan akses teknologi yang terbatas sering kali mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan layanan publik berbasis digital secara optimal. Rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan elektronik yang disediakan oleh pemerintah. Banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami atau mampu menggunakan sistem layanan digital, sehingga tujuan efisiensi dan kemudahan pelayanan belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu faktor infrastruktur dan literasi digital, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintahan. Dalam banyak kasus, transformasi digital belum diimbangi dengan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam mengelola sistem berbasis teknologi. Hal ini menyebabkan proses implementasi smart governance berjalan tidak optimal. Budaya organisasi birokrasi yang masih cenderung konvensional juga menjadi hambatan dalam proses adaptasi terhadap perubahan digital. Resistensi terhadap perubahan serta kurangnya inovasi dalam lingkungan kerja birokrasi turut mempengaruhi keberhasilan implementasi smart governance di berbagai daerah.

Kepercayaan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Smart governance, kepercayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang berkualitas melalui sistem digital. Apabila layanan publik berjalan dengan baik, transparan, dan mudah diakses, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah cenderung meningkat. Sebaliknya, jika implementasi smart governance tidak berjalan efektif, maka hal tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Implementasi smart governance di Indonesia masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa daerah telah berhasil mengimplementasikan sistem pelayanan publik berbasis digital dengan baik, sementara daerah lain masih menghadapi berbagai kendala teknis dan non-teknis. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan smart governance belum sepenuhnya merata dan masih memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhinya. Perkembangan inovasi pelayanan publik berbasis smart governance di Indonesia. Kajian tersebut tidak hanya berfokus pada aspek keberhasilan implementasi, tetapi juga perlu mengidentifikasi berbagai strategi yang digunakan, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik.

Penelitian ini juga penting untuk memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang transformasi digital pemerintahan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merancang strategi implementasi smart governance yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan smart governance, diharapkan pelayanan publik di

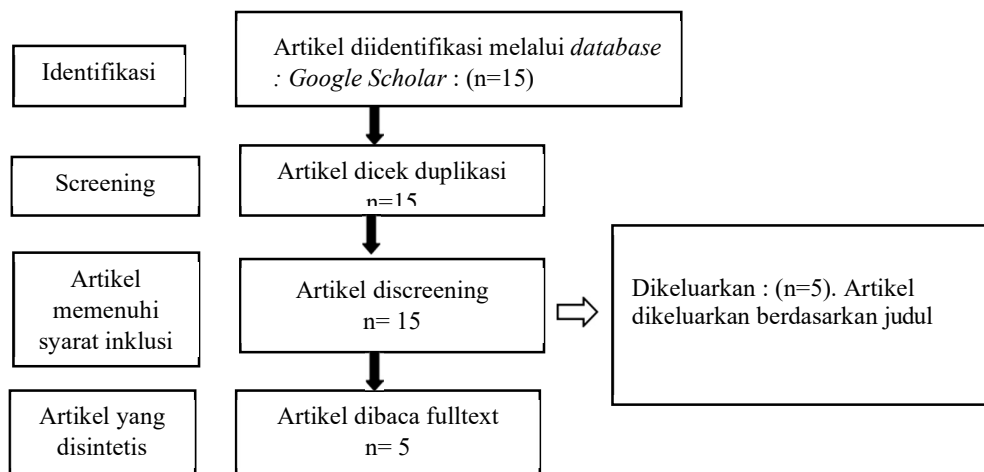
Indonesia dapat terus berkembang menuju arah yang lebih modern, inklusif, dan berbasis teknologi. Inovasi pelayanan publik berbasis smart governance melalui pendekatan Systematic Literature Review menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan kondisi eksisting, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika, tantangan, serta dampak dari implementasi smart governance terhadap kepercayaan publik di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji inovasi pelayanan publik berbasis smart governance di Indonesia dengan fokus pada strategi, hambatan, dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Proses SLR dilakukan secara sistematis melalui perumusan pertanyaan penelitian yang berfokus pada implementasi smart governance dalam pelayanan publik, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran literatur pada database ilmiah seperti Google Scholar dan sumber jurnal ilmiah lainnya. Kata kunci yang digunakan meliputi “smart governance”, “pelayanan publik digital”, “e-government”, “inovasi pelayanan publik”, serta “kepercayaan publik”. Artikel yang dipilih dalam kajian ini dibatasi pada publikasi beberapa tahun terakhir, baik berbahasa Indonesia maupun Inggris, serta memiliki relevansi langsung dengan topik smart governance di Indonesia. Literatur yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi dieliminasi untuk menjaga validitas kajian. Selanjutnya, data dari literatur terpilih diekstraksi dan dianalisis secara kualitatif deskriptif menggunakan teknik sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola strategi implementasi, berbagai hambatan yang muncul, serta dampak penerapan smart governance terhadap kualitas pelayanan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses seleksi artikel mengikuti pedoman dari *Preferred Reporting Systematic Reviews and (PRISMA)* dan terdiri dari beberapa tahap. Tahap awal melibatkan pencarian artikel, dan pada tahap ini, jumlah artikel yang ditemukan dalam periode tahun 2020-2025 adalah sebanyak 15 artikel. Kemudian, dilanjutkan dengan tahap screening, di mana artikel-artikel ini dianalisis lebih lanjut. Setelah proses *screening*, sebanyak 5 artikel dipilih untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap berikutnya adalah evaluasi kualitas artikel, di mana setiap artikel diperiksa untuk memastikan keandalan dan kualitasnya. Hasil dari tahap evaluasi ini adalah bahwa 5 artikel memenuhi syarat dan layak disertakan dalam laporan akhir kajian dari pustaka. Ini mencerminkan proses seleksi artikel yang ketat dan sistematis sesuai dengan panduan PRISMA.



Bagan 1. Diagram PRISMA

Tabel 1. Pelayanan Publik Berbasis Smart Governance Di Indonesia

No	Penulis & judul	Tujuan	Hasil
1	Efektivitas interoperabilitas data pelayanan “ lapor ” sleman sebagai perwujudan smart governance (nugroho, 2025)	Menganalisis efektivitas interoperabilitas data pada sistem layanan lapor sleman dalam mewujudkan smart governance.	Aplikasi lapor sleman cukup efektif dalam menangani pengaduan masyarakat dengan tingkat penyelesaian mencapai 85% dalam dua tahun serta berkontribusi pada peningkatan transparansi, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik, meskipun masih terdapat kendala teknis dan rendahnya partisipasi masyarakat.
2	Transformasi digital layanan pendidikan: integrasi administrasi publik dan manajemen pendidikan di era smart governance (rahim & ihsan, 2025)	Menganalisis peran transformasi digital dalam modernisasi layanan pendidikan pada era smart governance serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.	Efektivitas transformasi digital di sektor pendidikan ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu keselarasan kebijakan antarinstansi, ketersediaan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi dan literasi digital sdm, serta budaya organisasi yang mendukung inovasi, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.
3	Persepsi aparatur sipil negara (asn) muda terhadap penerapan inovasi pelayanan publik berbasis digital di wilayah kalselteng (anhar & anhar, 2026)	Memahami persepsi aparatur sipil negara (asn) muda terhadap inovasi pelayanan publik dalam konteks digitalisasi birokrasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi pelayanan publik di berbagai daerah memiliki tingkat perkembangan yang berbeda, di mana asn muda berperan sebagai katalis perubahan birokrasi, namun masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan infrastruktur, literasi digital masyarakat, serta resistensi budaya organisasi.
4	Pengaruh penerapan e-government (spbe) melalui penggunaan aplikasi “sakedap” terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dalam Mewujudkan smart city (studi kasus di kecamatan cileunyi,	Mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi sakedap terhadap efektivitas pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan cileunyi serta faktor-faktor yang memengaruhinya.	Penggunaan aplikasi sakedap berpengaruh positif terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di kecamatan cileunyi melalui peningkatan kelancaran layanan administrasi kependudukan, didukung oleh sosialisasi, manajemen birokrasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

	kabupaten bandung) (aushap et al., 2023)		
5	Optimalisasi kebijakan smart governance; studi peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan publik (alam et al., 2024)	Mengukur tingkat kematangan smart governance serta efektivitas layanan ekonomi dan pendidikan dalam penerapan smart governance di kota makassar.	Tingkat kematangan smart governance di kota makassar menunjukkan bahwa dimensi teknologi dan kelembagaan lebih baik dibandingkan dimensi manusia, sementara layanan sektor ekonomi dinilai lebih efektif, efisien, dan bermanfaat oleh masyarakat dibandingkan layanan pendidikan yang masih rendah, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih holistik untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Inovasi pelayanan publik berbasis smart governance di Indonesia menunjukkan arah transformasi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan teknologi digital dalam layanan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administrasi, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam mempercepat proses pelayanan, meningkatkan keterpaduan data antarinstansi, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah. Berbagai strategi yang digunakan dalam implementasi smart governance umumnya berfokus pada digitalisasi sistem layanan, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan perubahan berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi pelayanan publik sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan teknologi dengan proses birokrasi yang ada.

Implementasi smart governance di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya integrasi data antar lembaga menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang benar-benar terintegrasi. Resistensi budaya organisasi dan keterbatasan kompetensi aparatur juga turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan inovasi digital di sektor publik. Meskipun demikian, dampak dari penerapan smart governance cenderung positif, terutama dalam meningkatkan efisiensi layanan, memperluas akses informasi, dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Dalam jangka panjang, keberhasilan inovasi ini berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama apabila didukung oleh konsistensi kebijakan, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekosistem pelayanan publik digital.

Inovasi pelayanan publik berbasis smart governance di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital. Implementasi sistem berbasis interoperabilitas data, seperti pada layanan pengaduan masyarakat, terbukti mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan efisiensi pelayanan publik dengan tingkat penyelesaian yang cukup tinggi. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan teknis dan rendahnya partisipasi masyarakat yang menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh lapisan publik (Nugroho, 2025). Strategi digitalisasi pelayanan publik

perlu diiringi dengan penguatan infrastruktur dan peningkatan keterlibatan masyarakat agar tujuan smart governance dapat tercapai secara menyeluruh.

Transformasi digital di sektor layanan publik, termasuk pendidikan, menunjukkan bahwa efektivitas smart governance sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan, infrastruktur, kompetensi SDM, dan budaya organisasi. Keempat faktor ini menjadi penentu utama keberhasilan implementasi layanan berbasis digital yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan yang muncul dalam implementasi tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan kapasitas dan literasi digital masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal (Rahim & Ihsan, 2025).

Dari perspektif aparatur sipil negara (ASN), inovasi pelayanan publik berbasis digital menunjukkan adanya peran strategis ASN muda sebagai agen perubahan dalam birokrasi modern. Meskipun demikian, keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital masyarakat, serta resistensi budaya organisasi masih menjadi hambatan yang signifikan dalam proses digitalisasi pelayanan publik di berbagai daerah (Anhar & Anhar, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan smart governance tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan adaptasi organisasi birokrasi.

Implementasi e-government melalui aplikasi layanan publik juga menunjukkan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan, terutama dalam layanan administrasi kependudukan. Penggunaan sistem digital mampu mempercepat proses layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang didukung oleh sosialisasi, manajemen birokrasi yang baik, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (Aushap et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa integrasi teknologi dalam pelayanan publik memiliki dampak positif terhadap peningkatan kinerja birokrasi. Tingkat kematangan smart governance masih menunjukkan ketimpangan, terutama antara dimensi teknologi dan kelembagaan dengan dimensi manusia. Beberapa sektor layanan seperti ekonomi menunjukkan efektivitas yang lebih baik dibandingkan sektor pendidikan yang masih mengalami berbagai keterbatasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam pengembangan smart governance agar seluruh sektor pelayanan publik dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan (Alam et al., 2024).

Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis smart governance di Indonesia memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Namun, hambatan berupa kesenjangan digital, keterbatasan SDM, serta belum optimalnya integrasi sistem menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Apabila hambatan tersebut dapat diminimalisir melalui strategi yang tepat, maka smart governance berpotensi besar dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui layanan yang lebih cepat, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian systematic literature review, dapat disimpulkan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis smart governance di Indonesia telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, terutama pada aspek efisiensi, transparansi, dan efektivitas layanan publik. Implementasi berbagai sistem digital seperti e-government, interoperabilitas data, dan aplikasi layanan publik menunjukkan adanya peningkatan kinerja birokrasi serta kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Namun, keberhasilan smart governance masih belum merata di seluruh daerah karena adanya ketimpangan infrastruktur, keterbatasan literasi digital, serta belum optimalnya integrasi antarinstansi. Hambatan utama dalam implementasi smart governance tidak hanya bersifat

teknis, tetapi juga mencakup aspek sumber daya manusia dan budaya organisasi birokrasi. Meskipun demikian, dampak positif yang dihasilkan berupa meningkatnya transparansi dan kualitas pelayanan publik turut berkontribusi terhadap potensi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Smart governance memiliki peran strategis dalam transformasi pelayanan publik di Indonesia, namun masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan agar implementasinya dapat berjalan secara optimal dan merata.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur digital secara merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang masih tertinggal, agar kesenjangan layanan publik dapat diminimalisir. Peningkatan literasi digital masyarakat dan kompetensi aparatur sipil negara perlu menjadi prioritas melalui pelatihan berkelanjutan agar pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dapat berjalan secara optimal. Diperlukan integrasi sistem data antarinstansi yang lebih baik untuk mendukung interoperabilitas layanan publik sehingga proses birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah juga perlu meningkatkan strategi komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi publik dalam penggunaan layanan digital. Penguatan kebijakan yang bersifat kolaboratif dan adaptif sangat diperlukan agar implementasi smart governance dapat mendukung terwujudnya pelayanan publik yang modern, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S., Anwar, A. F., Wahyuddin, A., Pada, A. T., & Hardianti, P. (2024). *Optimalisasi Kebijakan Smart Governance; Studi Peningkatan Efisiensi Dan Kualitas Pelayanan Publik*. 10(2), 144–169. <https://doi.org/10.21776/Ub.Transformative.2024.010.02.1>
- Anhar, D., & Anhar, A. I. (2026). *Persepsi Aparatur Sipil Negara (Asn) Muda Terhadap Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Wilayah Kalselteng*. 4(4), 12078–12086.
- Aushap, A., Naufal, M. L., Nurjaman, M., & Darmawan, I. (2023). *Pengaruh Penerapan E-Government (Spbe) Melalui Penggunaan Aplikasi “Sakedap” Terhadap Efisiensi Dan Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Smart City (Studi Kasus Di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung)*. 1(December), 233–243.
- Katharina, R. (2021). *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. Pustaka Obor Indonesia.
- Loso Judijanto, Unang Atmaja, Irawati Irawati, Dany Juhandi, Sri Yani Kusumastuti, N. C. (2023). *Ekonomi Pembangunan Pedesaan*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- M. Harry Mulya Zein, S. S. (2025). *Smart Governance: Transformasi Digital Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Pt Sada Kurnia Pustaka.
- Nugroho, H. S. (2025). *Efektivitas Interoperabilitas Data Pelayanan “Lapor” Sleman Sebagai Perwujudan Smart Governance*. 10(3), 618–636.
- Rahim Kausar, M. I. (2025). *Transformasi Digital Layanan Pendidikan: Integrasi Administrasi Publik Dan Manajemen Pendidikan Di Era Smart Governance* Rahim. 3 *Transformasi*, 2(3).
- Ramadhany, R., Rustiyana, R., Rianty, E., Baskoro, S. E., Hardini, I. R., & Anitasari, M. (2025). *Transformasi Digital Sektor Publik*. Yogyakarta: Pt. Star Digital Publishing.
- Ridha Ramadhany, Rustiyana Rustiyana, Erfina Rianty, Sentot Eko Baskoro, Inkreswari Retno Hardini, M. A. (2025). *Transformasi Digital Sektor Publik*. Pt. Star Digital Publishing.